

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (OPD)  
TAHUN 2024-2026**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



**DPPKB  
KOTA LUBUKLINGGAU  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta atas usaha dan kerjasama anggota tim penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 diterbitkan sebagai norma, standar, prosedur, kriteria, dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama Tiga Tahun ke depan. dimana Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Lubuklinggau, 13 April 2023

Kepala DPPKB  
Kota Lubuklinggau



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
Nip.19830710 200112 2001

## DAFTAR ISI

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>  | ..... | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b>   | ..... | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>   | ..... | <b>iii</b> |
| <br>  |       |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  | ..... | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang   | ..... | 1          |
| 1.2. Landasan Hukum   | ..... | 3          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan  | ..... | 4          |
| 1.4. Sistematika Penulisan  | ..... | 5          |
| <br>  |       |            |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b>                                      | ..... | <b>7</b>   |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi                            | ..... | 7          |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah                                     | ..... | 11         |
| 2.3. Kinerja Pelayanan  | ..... | 12         |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan...                  | ..... | 15         |
| <br>  |       |            |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>                     | ..... | <b>21</b>  |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | ..... | 21         |
| 3.2. Penentuan Isu Strategis  | ..... | 23         |
| <br>  |       |            |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>                                      | ..... | <b>31</b>  |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah                               | ..... | 31         |
| <br>  |       |            |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                              | ..... | <b>33</b>  |
| <br>  |       |            |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN</b>             |       |            |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN</b>                    | ..... | <b>37</b>  |
| <br>  |       |            |
| <b>BAB VIII PENUTUP</b>   | ..... | <b>39</b>  |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas” Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk. Pembangunan kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas

*Rencana Strategis Tahun 2024-2026*

*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau*

penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan catatan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Bonus demografi, jika dimanfaatkan akan menghasilkan jendela peluang atau *window of opportunity* untuk memicu pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa. Pada saat bersamaan akan menghasilkan kualitas penduduk usia produktif yang tinggi sehingga menjadi modal pembangunan bangsa dengan karakter keuletan dan ketangguhan sebagai unsur utama dalam mewujudkan ketahanan nasional guna mengantisipasi berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi, Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau perlu menyusun perencanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub unit organisasi sehingga pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Lubuklinggau tahun 2024-2026 dapat terwujud.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah (RPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Lubuklinggau tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

*Rencana Strategis Tahun 2024-2026*

*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau*

Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

9. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau.
10. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032.
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah Tahun 2005-2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Perumusan dan penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024-2026 Memberikan arah dan Kegiatan untuk jangka waktu Tiga tahun kedepan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 ini, adalah sebagai berikut:

- Untuk menetapkan Prioritas Program dan Kegiatan yang strategis selama 3 (Tiga) tahun.
- Untuk memberikan landasan taktis strategi dua Puluh tahun dalam rangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini berisi tentang latar Belakang yang menguraikan secara ringkas Pengertian Renstra OPD, Fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, Landasan hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

Sistematika Renstra memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Pada bab ini menguraikan tentang informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD**

Bab ini memuat kondisi yang diharapkan dan proyeksinya, identifikasi faktor internal kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness), Identifikasi faktor Eksternal peluang (opportunity) dan ancaman (threats).

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan Program kegiatan dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026.

#### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan urusan pemerintahan wajib Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau

#### BAB VIII. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan, penyusunan Renstra, dasar Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.**

##### **2.1.1 Tugas**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

##### **2.1.2 Fungsi**

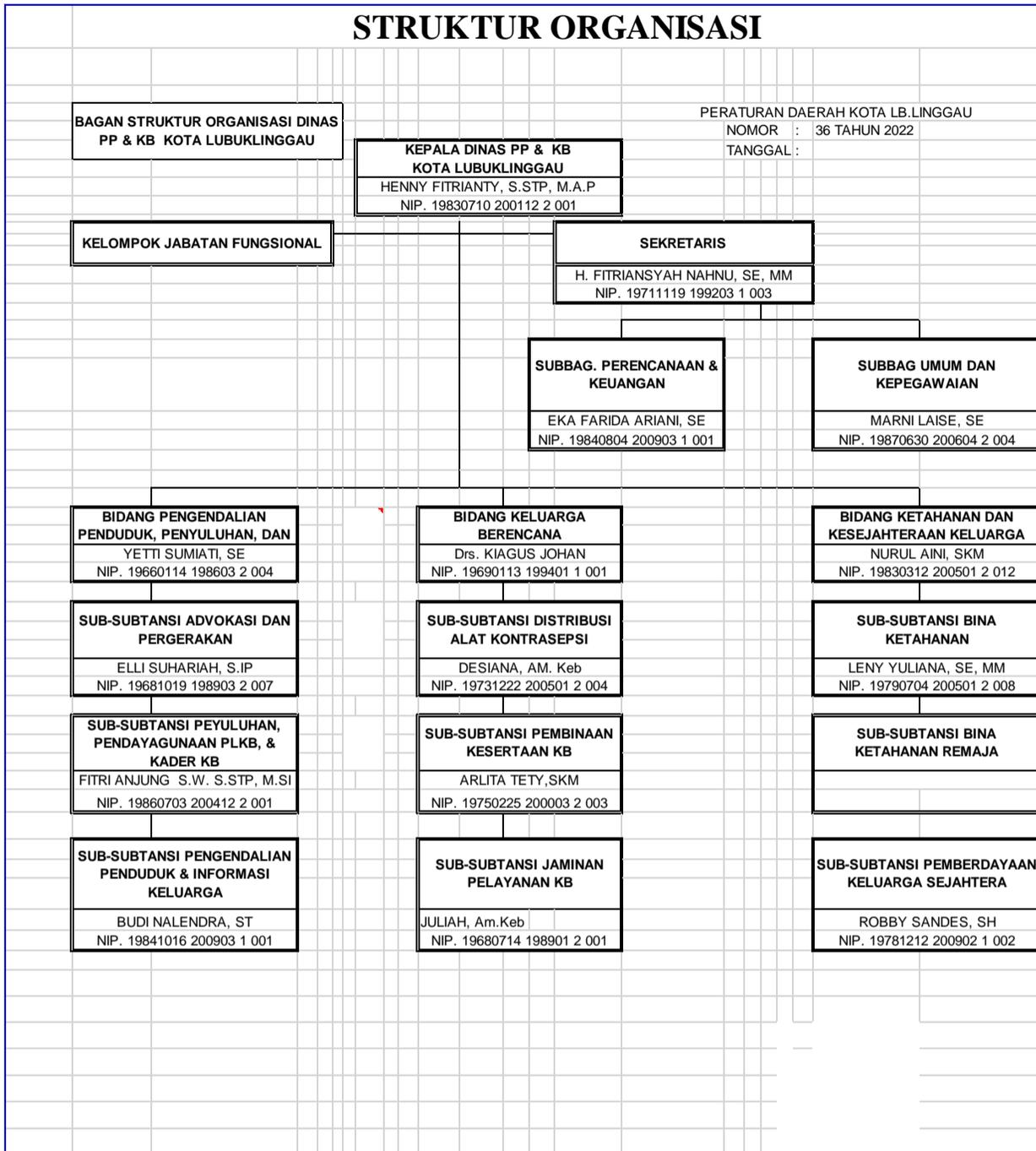
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya.
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA TAHUN 2023**



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang dibantu oleh:

A. Sekretaris membawahkan;

- Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan

B. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan;

- Sub-substansi Advokasi dan Penggerakan
- Sub-substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan kader KB
- Sub-substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

C. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan;

- Sub-substansi Distribusi Alat Kontrasepsi
- Sub-substansi Jaminan Pelayanan KB
- Sub-substansi Pembinaan kesertaan KB

D. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan;

- Sub-substansi Pemberdayaan Keluarga sejahtera
- Sub-substansi Ketahanan Keluarga
- Sub-substansi Bina Ketahanan remaja

E. Jabatan Fungsional Keluarga Berencana

## 2.2 Sumber Daya OPD

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan urusan wajib dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan kota sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

harus memiliki potensi sumber daya manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### 1. Berdasarkan Golongan

**Tabel II.1**

| <b>Golongan</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>Jumlah (orang)</b> |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| II              | -        | -        | -        | 1        | 1                     |
| III             | 1        | 2        | 1        | 13       | 17                    |
| IV              | 5        | 1        | -        | -        | 6                     |
| Jumlah          |          |          |          |          | 24                    |

### 2. Berdasarkan Jabatan

**Tabel II.2**

| <b>No</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Jumlah (orang)</b> |
|-----------|----------------|-----------------------|
| 1         | Eselon II a    |                       |
| 2         | Eselon II b    | 1                     |
| 3         | Eselon III a   | 1                     |
| 4         | Eselon III b   | 3                     |
| 5         | Eselon IV a    | 10                    |
| Jumlah    |                | 15                    |

### 3. Berdasarkan Pendidikan

**Tabel II.3**

| No     | Jabatan  | Jumlah (orang) |
|--------|----------|----------------|
| 1      | S2       | 7              |
| 2      | S1 / DIV | 13             |
| 3      | D 4      | -              |
| 4      | D2       | -              |
| 5      | D3       | 4              |
| 5      | SMA      | -              |
| Jumlah |          | 23             |

#### 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Program Keluarga Berencana mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera karena kondisi kependudukan di Indonesia pada saat ini, baik yang menyangkut jumlah, kualitas maupun persebarannya merupakan tantangan yang berat yang harus diatasi bagi tercapainya keberhasilan pembangunan Indonesia. Oleh sebab itu salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan pemerintah, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitasnya.

Capaian kinerja Bidang Keluarga Berencana yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau dari tahun 2019-2022 setiap tahun meningkat mencapai target dan sasaran. Salah satu indikator Kinerja yaitu Prevelensi Peserta KB Aktif dengan realisasi 59,74 % telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 57,91 %, artinya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kota Lubuklinggau sebagian besar sudah menggunakan alat dan obat kontrasepsi terus menerus dan tidak terputus atau Drop out.

Dampak dari pencapaian peserta KB aktif salah satunya adalah dengan menekan serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Kota Lubuklinggau .

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai berikut :



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang profesional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini Untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks. Langkah-langkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibilitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi kegiatan. Kekurangan dan kelemahan dimasa lalu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang, kualitas perencanaan dapat lebih ditingkatkan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dapat berjalan efektif, efisien dan menyeluruh seperti yang diharapkan, koordinasi lintas program dan lintas sektor berjalan dengan baik dalam suasana yang kondusif dengan mengutamakan rasa saling menghargai dan berupaya mengurangi ego sektoral masing-masing.

Harapan lain yang sama pentingnya adalah adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur. Tersedianya *Sistem Informasi Manajemen* pada masa yang akan datang adalah suatu keharusan, hal ini diperlukan guna menghasilkan produk perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang lebih berkualitas, berimbang dan berkelanjutan, serta terwujudnya monitoring dan evaluasi yang efektif, efisien dan menyeluruh serta terukur.

### 2.4.1 Tantangan

1. Memantapkan SDM Pengelola Keluarga Berencana karena perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang

- menyebabkan perpindahan dan mutasi pegawai yang menangani Program KB Nasional di kecamatan/kelurahan.
2. Menambah jumlah tenaga Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat kelurahan/desa yang merupakan ujung tombak Program KKB. Data terakhir menunjukkan bahwa berjumlah 26 orang PKB dan 7 Orang P3K yang membina 8 kecamatan serta ke 72 kelurahan di Kota Lubuklinggau.
  3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran Program KKB yang belum memadai. Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mempunyai kemampuan kreativitas dan inovatif dalam bermitra dengan pemangku kepentingan agar pembangunan kependudukan dan KB menjadi program prioritas.
  4. Meningkatkan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD yang diharapkan dapat bertugas sebagai pembina di kelurahan dan RT. Saat Kondisi terdapat 72 PPKBD yang mendapat insentif dan 552 Sub-PPKBD tetapi belum mendapat insentif.
  5. Meningkatkan sinergitas kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

#### 2.4.2 Peluang

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BKKBN mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan nasional, penetapan Norma Standar

Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan.

2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan Program KB di tingkat pusat, dan kabupaten/kota.
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan Pembangunan KKB Nasional di Kota Lubuklinggau.

#### 2.4. 3. Kelompok Sasaran Layanan di DPPKB

1. Menurut BKKBN Pasangan Usia Subur (PUS) adalah Pasangan Suami Istri yang istrinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau Pasangan Suami Istri yang istrinya Berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, atau istri sudah berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.
2. Wanita Usia Subur (**WUS**) adalah wanita yang masih dalam usia reproduktif (sejak mendapat haid pertama sampai berhentinya haid), yaitu antara usia 15-49 tahun, dengan status belum menikah, menikah atau janda, yang berpotensi untuk mempunyai keturunan.
3. **Rumah DataKu** adalah rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat **data** dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistim pengelolaan dan pemanfaatan **data** kependudukan di tingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, menverifikasi, menganalisis, **data** yang bersumber dari, oleh dan masyarakat

4. **Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)** didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi **keluarga** dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, **keluarga** dan masyarakat.
5. Petugas Lapangan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat **PLKB** adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KKB
6. Remaja adalah Penduduk dalam rentang usia 10-24 tahun dan belum menikah.
7. Bina Keluarga Remaja selanjutnya disingkat **BKR** adalah Wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun.
8. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa selanjutnya disingkat **PIK R/M** adalah Program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam perencanaan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.
9. Calon Pengantin selanjutnya disingkat **Catin** adalah Pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.
10. Pendidikan Pra Nikah bagi Calon Pengantin adalah Membekali pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin sehingga memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai.
11. Balita (Bawah Lima Tahun) adalah Anak yang berusia 0-59 bulan.
12. Bina Keluarga Balita selanjutnya disingkat **BKB** adalah Wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita-anak, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain untuk

mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.

13. Lansia adalah Seseorang yang berusia 60 tahun ke atas.

14. Bina Keluarga Lansia selanjutnya disingkat **BKL** adalah Wadah kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang tangguh (sehat, mandiri, aktif dan produktif) sehingga tetap dapat diberdayakan dalam pembangunan dengan memperhatikan kearifan.

15. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor selanjutnya disingkat **UPPKA** adalah Kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur (PUS) yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.

#### 2.4.4. Mitra Dinas Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) membutuhkan mitra kerja untuk meningkatkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana). Adapun Mitra Kerja/Stakholder yang dimaksud yaitu:

1. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai motor penggerak dan pembina potensi masyarakat khususnya keluarga dalam pelaksanaan Program Banggakencana dari tingkat Provinsi sampai ke lini terdepan Kader PKK Desa merupakan mitra yang sangat potensial.
2. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan strategis yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kebidanan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, khususnya

kesehatan reproduksi perempuan dan tumbuh kembang bayi dan balita. Di samping itu bidan sebagai mitra perempuan dan menjadi role model bagi keluarga, oleh karena itu kesiapan bidan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas sudah menjadi kebutuhan yang mendasar.

3. Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sebagai mitra kerja dalam kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sekolah-sekolah dan di luar sekolah, dimana Dinas Kesehatan dan IDI berkontribusi sebagai narasumber yang kompeten mengenai kesehatan reproduksi remaja.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Perguruan Tinggi, sebagai mitra kerja dalam pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
5. Kementerian Agama sebagai mitra kerja dalam kegiatan Pendidikan Pra Nikah Catin yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tentang Pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Pendidikan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.
6. OPD yang Terkait sangat strategis untuk meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang secara bersama-sama membangun Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sehingga nantinya dapat memberikan manfaat secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.**

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh BKKBN dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pakai Tabel 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

- 1. Masih tingginya angka kelahiran.** Berdasarkan hasil Data Susenas Tahun 2019 angka kelahiran total (TFR) Kota Lubuklinggau di angka 2.35, berarti rata-rata wanita usia subur yang melahirkan anak per 1000 kelahiran berjumlah 2 atau tiga anak pertahun. Untuk Mencapai angka kelairan total (TFR) Menjadi 2.1 Tahun 2026 ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya pemakaian alat dan obat kontrasepsi, usia kawin pertama, keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan.
- 2. Bervariasinya angka pemakaian kontrasepsi.** Prevalensi pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence rate/CPR*) masih rendah dan bervariasi, terutama Peserta KB Pria yaitu sekitar 2.34 % dari peserta KB.
- 3. Masih tinggi dan bervariasinya *unmet need*.** Kebutuhan Ber-KB Jumlah pasangan usia subur yang belum terlayani (*Unmetneed*) dengan alasan tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda sebesar 16,93 tahun 2021 (data PK 21) dari Pasangan Usia subur lebih tinggi bila dibanding dengan target renstra BKKBN 2020 – 2024 .

#### **4. Pemahaman PUS dan Remaja tentang keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

Rendahnya Pemahaman PUS dan Remaja tentang Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan berkeluarga sehingga dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya terkait penyakit menular, kehamilan diusia muda hingga aborsi. Angka Kelahiran umur 15-19 tahun relatif masih tinggi.

#### **5. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB.**

Menurut teori kependudukan, pada saat CPR telah mencapai di atas 50 persen, sangat sulit untuk meningkatkan peserta KB oleh karena sisa PUS pada umumnya adalah kelompok-kelompok sulit (*hard core*) yang memerlukan terobosan-terobosan baru mengajak mereka ber-KB. Salah satu upaya inovatif yang dipergunakan untuk mengajak mereka melalui pembentukan kelompok-kelompok kegiatan (poktan) yang ada, salah satunya adalah UPPKA. Di samping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Pra-sejahtera dan Sejahtera I maka upaya peningkatan pendapatan keluarga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kesertaan ber KB-nya dan sampai dengan saat ini poktan tersebut belum optimal dalam meningkatkan dan membina kesertaan ber-KB serta meningkatkan kemandiriannya.

#### **6. Masih belum sinerginya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas, baik secara vertikal maupun horizontal, serta masih terdapatnya kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk.**

Hal ini berdampak pada melambatnya pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir karena terjadi in-efisiensi dalam pembangunan. Oleh karena penanganan masalah kependudukan melibatkan banyak sektor dan pemangku kepentingan, maka para pemangku kepentingan tersebut harus dapat berbagi visi, satu tujuan, dan satu tekad, menuju pembentukan SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, harus ada

upaya bersama yang saling bersinergi (*concerted efforts*) antara semua pemangku kepentingan. Upaya tersebut seharusnya dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang mempunyai tugas antara lain menyetarakan kebijakan kependudukan secara konsisten dan berkesinambungan, mengingat keberhasilan kebijakan kependudukan baru terlihat hasilnya beberapa dekade mendatang, yakni adanya peningkatan kualitas SDM. Profesionalisme dan peningkatan serta pengembangan sumberdaya manusia aparatur perencana dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak manajemen organisasi. Hal ini menyebabkan artikulasi dan implementasi terhadap enam agenda pembangunan belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi relatif masih dianggap sekedar rutinitas sehingga terkesan kurang inovatif, kewenangan relatif belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masing-masing unit kerja dan unit organisasi belum memahami uraian tugas, sehingga tidak memiliki arah dan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

#### **7. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)**

Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana “Bangga Kencana” serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Indikator keberhasilan Kampung KB dapat diukur dari pelaksanaan 8 fungsi keluarga dan tingkat klasifikasi kampung KB. Menurut data laporan kampung KB (Website kampung KB) dikota Lubuklinggau dari 72 kampung KB yang ada, terdapat 5 Kampung KB yang termasuk dalam klasifikasi Mandiri/Berkelanjutan (6,94%). Kondisi ini jauh dari target yang ditetapkan oleh BKKBN RI yakni sebesar 30% dari kampung KB yang ada.

### **3.2. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau kedalam pola analisis SWOT.

Analisa Lingkungan dengan pola analisis SWOT.

#### **1. Kekuatan (*Strengths*)**

- a. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Visi dan Misi dan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang objektif dan teragenda dengan jelas
- c. Kuantitas SDM yang memadai
- d. Sistem kerja administrasi yang baik
- e. Tersedianya peraturan dan perundang-undangan
- f. Kewenangan otonomi daerah
- g. Penerapan informasi Teknologi yang memadai
- h. Meningkatnya disiplin waktu kerja
- i. Animo Masyarakat untuk ber KB sangat tinggi

#### **2. Kelemahan (*Weakness*):**

- a. Pelaksanaan tupoksi belum optimal
- b. Dana operasional yang terbatas
- c. Belum tersedianya data dan informasi yang akurat pada sebahagian bidang tertentu
- d. Profesionalisme SDM Apartur Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum optimal
- e. Kemitraan diantara terhadap organisasi masyarakat belum optimal
- f. Masih kurangnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan KIE KB dan KS
- g. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap Ibi-ibu tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga,
- h. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum efektif di dalam pelaksanaan dan pengendalian program-program.

### **3. Peluang (*Opportunity*)**

- a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah
- b. Organisasi Perempuan semakin bertambah
- c. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan keluarga sejahtera
- d. Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik,
- e. Animo masyarakat ber-KB sangat besar

### **4. Ancaman (*Threat*)**

- a. Rendahnya pemahaman terhadap Informasi Teknologi
- b. Tingginya perkembangan budaya-budaya yang berasal dari luar Kota Lubuklinggau.
- c. Masyarakat masih membedakan kesetaraan gender terhadap perempuan

Berdasarkan hasil analisa lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Pilihan-pilihan strategis di bawah ini adalah hasil analisa SWOT yang dilakukan berdasarkan analisa lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Ada beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan untuk waktu dan kesempatan yang berbeda. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.
2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Tabel berikut adalah hasil analisa SWOT dan strategi-strategi yang dapat dikembangkan

**Tabel**

**Matriks analisa SWOT: Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunities)**

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Lingkungan Internal</b></p> <p style="text-align: center;">A<br/>n<br/>a<br/>l<br/>i<br/>s<br/>a</p> <p style="text-align: center;"><b>Lingkungan Eksternal</b></p>   | <p>Kekuatan (Strength) “S”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Organisasi DPPKB</li> <li>2. Visi dan Misi dan kegiatan DPPKB yang objectif dan teragenda dengan jelas</li> <li>3. Kuantitas SDM yang memadai</li> <li>4. Sistem kerja administrasi yang baik</li> <li>5. Tersedianya peraturan dan perundang-undangan</li> <li>6. Kewenangan otonomi daerah</li> <li>7. Penerapan informasi Teknologi yang memadai</li> <li>8. Meningkatnya disiplin waktu kerja</li> <li>9. Animo Masyarakat untuk ber KB sangat tinggi</li> </ol>  |
| <p>Peluang (Opportunities) “O”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah</li> <li>2. Organisasi Perempuan di Kota Lubuklinggau semakin bertambah</li> <li>3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan keluarga sejahtera</li> <li>4. Situasi dan kondisi keamanan kondusif</li> <li>5. Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik,</li> </ol> | <p>Menggunakan Kekuatan (Strength) “S” untuk mendapatkan Peluang (Opportunities) “O” = “S” + “O”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendayagunaan Wewenang atas fungsi perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.</li> <li>2. Penyusunan time schedule kegiatan prioritas dengan sumber daya pembangunan untuk proses percepatan tujuan dan penentuan kriteria kendala dan atau permasalahan.</li> <li>3. Pemanfaatan sarana, prasarana dan keteraturan administrasi untuk meningkatkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam mendukung fungsi BKB dan PP.</li> </ol> |

**Tabel**

**Matriks analisa SWOT: Kelemahan (Weakness) - Peluang (Opportunities)**

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Lingkungan Internal</b></p> <p style="text-align: center;">A<br/>n<br/>a<br/>l<br/>i<br/>s<br/>a</p> | <p>Kelemahan (Weakness) “W”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan tupoksi belum optimal</li> <li>2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan medis KB dan KIE yang belum memadai</li> <li>3. Dana operasional yang terbatas</li> <li>4. Belum tersedianya data dan informasi yang akurat pada sebahagian bidang tertentu</li> <li>5. Profesionalisme SDM Apartur DPPKB belum optimal</li> <li>6. Kemitraan diantara DPPKB terhadap organisasi masyarakat belum optimal</li> <li>7. Masih kurangnya DPPKB melakukan sosialisasi tentang pengetahuan kesehatan dan gizi pada masyarakat,</li> <li>8. Masih belum berjalannya UPPKS terhdap keluarga Pra sejahtera dan KS I alas an ekonomi tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga,</li> <li>9. DPPKB belum efektif di dalam pelaksanaan dan</li> </ol> |
|--|--|

*Rencana Strategis Tahun 2024-2026*

*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau*

|   |  |
|---|--|
| a   | pengendalian program-program   |
| Lingkungan Eksternal  |  |
| <b>Peluang (Opportunities) "O"</b><br>1. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah<br>2. Organisasi Perempuan di Kota Lubuklinggau semakin bertambah<br>3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan keluarga sejahtera<br>4. Situasi dan kondisi keamanan kondusif<br>5. Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik,<br>6. Saran, pendapat dan kritikan masyarakat. | <b>Mengatasi Kelemahan (weakness) "W"</b><br>memanfaatkan Peluang (Opportunities) "O" = "W" + "O"<br>1. Sosialisasi dan penerapan renstra DPPKB untuk meningkatkan penghargaan terhadap struktur, koordinasi lintas sektor, pengelolaan pencatatan dan pelaporan dan menciptakan motivasi kerja melalui situasi dan kondisi yang kondusif .<br>2. Pendidikan dan pelatihan manajemen, teknologi dan informasi, pengetahuan untuk meningkatkan kualitas SDM maupun Manajemen kerja/waktu, sehingga tupoksi berjalan lancar.<br>3. Pemanfaatan teknologi, informasi dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat. |

**Tabel**

**Matriks analisa SWOT : Kekuatan (Strength) – Ancaman (Threats)**

|   |  |
|---|--|
|   | <b>Kekuatan (Strength) "S"</b><br>1. Struktur Organisasi DPPKB<br>2. Visi, misi dan kegiatan DPPKB yang objektif dan teragenda dengan jelas.<br>3. Kuantitas SDM yang memadai.<br>4. Sistem administrasi kerja yang baik.<br>5. Tersedianya peraturan dan perunda-undangan<br>6. Kewenangan otonomi daerah.<br>7. Kemauan kerja sebagian besar SDM<br>8. Penerapan informasi dan teknologi yang memadai<br>9. Disiplin waktu sebagian besar aparat pemerintah meningkat. |
| <b>Ancaman (Threats)</b><br>1. Rendahnya pemahaman dan nilai serap terhadap TI<br>2. Tingginya perkembangan budaya-budaya yang berasal dari luar Kota Lubuklinggau<br>3. Belum maksimal KIE | <b>Penggunaan Kekuatan (Strength) "S" untuk mengatasi Ancaman (Threats) "T" = "S" + "T"</b><br>1. Memberdayakan Peraturan Daerah<br>2. Sosialisasi betapa pentingnya dengan meningkatkan penerapan informasi dan teknologi yang memadai dalam pemahaman nilai serap globalisasi..<br>3. Pemberdayaan sarana/prasarana dengan dukungan ketersediaan dana untuk  |

*Rencana Strategis Tahun 2024-2026*

*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau*

|  |   |
|--|---|
|  | <p>meningkatkan pelayanan pembangunan p</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan administrasi yang efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan pemerintah.</li> <li>Merealisasikan kemauan kerja SDM yang tinggi dengan dukungan data/informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai melalui penyuluhan dan pengarahan fungsi perencanaan dan pengendalian.</li> </ol> |
|--|---|

**Tabel**

**Matriks-4 analisa SWOT : Kelemahan (Weakness) - Ancaman (Threats)**

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Kelemahan (Weakness) “W”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan manajemen waktu terhadap tugas-tugas kurang tepat</li> <li>Pelaksanaan tupoksi belum optimal</li> <li>Sarana dan prasarana pendukung pelayanan Medis KB Dana operasional yang terbatas</li> <li>Belum tersedianya data dan informasi yang akurat pada sebahagian bidang tertentu</li> <li>Profesionalisme SDM Apartur DPPKB belum optimal</li> <li>Kemitraan diantara DPPKB terhadap organisasi masyarakat belum optimal</li> <li>Kurangnya sosialisasi yang dilakukan DPPKB tentang UPPKS keluarga Pra Sejahtera/KSI tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga,</li> </ol> |
| <p>Ancaman (Threats)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya pemahaman dan nilai serap terhadap IT</li> </ol> | <p>Meminimalkan Kelemahan (Weakness) “W” untuk menghindari dampak luas dari Ancaman (Threats) “T” = “W” + “T”..</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas SDM untuk menyerap IT</li> <li>Optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan akurasi data/informasi agar pendistribusian pengetahuan terhadap aparat dapat terlaksana.</li> <li>Memantapkan motivasi kerja agar manajemen waktu dapat ditingkatkan.</li> </ol>  |

Hasil Analisa SWOT yang terangkum dalam Tabel 1, 2, 3 dan 4 menunjukkan bahwa didapati frekuensi kemunculan hasil analisa yang terlihat dalam keseharian. Hal ini dapat dijadikan fokus pembenahan bagi sumber daya manusia dan manajemen ataupun sistem kerja dalam jangka pendek dan menengah, sehingga indikator keberhasilannya dapat dengan mudah di

*Rencana Strategis Tahun 2024-2026*

*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau*

inventarisir. Untuk progress jangka panjang, strategi atau cara-cara yang lebih adaptif dapat dirancang. Hasil analisa tersebut sekaligus menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan maupun penciptaan kinerja (performance) sumber daya manusia. Singkatnya, program dan prioritas kegiatan utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau, didasarkan dan dominan terhadap hasil analisa SWOT.

Hasil analisa SWOT dirumuskan strategi untuk yang menjadi kunci keberhasilan dan proyeksi kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan konsistensi dan konsekuensi pembagian dan pendelegasian Wewenang atas fungsi perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan Otonomi Daerah agar penyimpangan pengawasan dalam pembangunan dapat diperkecil yang dimulai dari lingkungan internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beerencana Kota Lubuklinggau untuk dapat diaplikasikan terhadap lingkungan eksternal.
2. Realisasi kemauan bekerja dengan memberdayakan SDM melalui pelaksanaan tupoksi yang jelas dengan dukungan data/informasi, ketersediaan dana, keteraturan sistem administrasi kerja dan dukungan sarana/prasarana lainnya untuk menghasilkan kegiatan perencanaan dan mencapai nilai keluaran proses perencanaan strategis. Hal ini secara langsung akan mempermudah pendistribusian pengetahuan dan wawasan aparat melalui penyuluhan dan pengarahan fungsi perencanaan dan pengendalian.
3. Pendidikan dan pelatihan bidang manajemen, teknologi dan informasi serta evaluasi penerapannya untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur maupun Manajemen kerja/waktu, sehingga tupoksi berjalan lancar.
4. Pemanfaatan teknologi, informasi dan sumber daya lainnya dengan administrasi yang baik dan efektif untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas program sehingga pengusulan rencana berjalan sesuai prosedur.

6. Optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan akurasi data/informasi agar proses kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyusunan dokumen perencanaan berjalan sesuai waktu yang ditargetkan.
7. Memantapkan sistem motivasi kerja. Motivasi dapat menciptakan gerak repleks nyata dan psikologi, bahkan dapat mengubah pola fikir negatif menjadi positif. Motivasi yang tepat dan terbaik diberikan kepada para personil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau adalah sistem motivasi yang mencakup nilai Emotional dan Spritual Question, yaitu dengan menjelaskan melalui contoh-contoh nyata atas tata nilai yaitu; nilai input, nilai proses dan nilai out put.
8. Pendidikan dan pelatihan manajemen, teknologi dan informasi, pengetahuan kesehatan dan gizi masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga serta evaluasi penerapannya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan SDM Aparatur.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan di tingkat daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1.1 Strategi dan Arah Kebijakan OPD**

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “Teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel V.1 di bawah ini.



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan pertimbangan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau, dengan demikian penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tindakan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Misi disusun dengan memperhatikan arah pembangunan RPJMD, keselarasan dengan Misi Walikota Lubuklinggau terpilih, Kondisi Umum Daerah dan unit/satuan kerja serta kontinuitas perencanaan tahun sebelumnya. Memperhatikan semua itu maka ditetapkan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan pada visi Kota Lubuklinggau adalah **"Penduduk tumbuh Seimbang dan keluarga berkualitas"** Untuk Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau terdapat dalam Misi I Walikota Lubuklinggau yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak, berkualitas dan berkarakter, pada prioritas 2 yaitu Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Prioritas 4 yaitu Kesejahteraan Rakyat.

Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada table VI.I

dibawah

*Rencana Strategis Tahun 2024-2026*

*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau*



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perwujudan misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Oleh karena posisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau sesuai urusan Pilihan pada posisi untuk mendukung dan menunjang Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak, berkualitas dan berkarakter, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau merumuskan misi dalam rencana strategi Tahun 2024-2026 dengan misi **"Penduduk tumbuh Seimbang dan keluarga berkualitas"** dapat dilihat pada tabel VII.1 di bawah ini.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau merupakan pedoman arah pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Kota Lubuklinggau.

Program dan kegiatan yang direncanakan selama 3 (lima) tahun kedepan berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 yang merupakan Dokumen Perencanaan di OPD sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari Program dan Prioritas. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi DPPKB yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

*Rencana Strategis Tahun 2024-2026  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau*

Diharapkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya mulai dari tahun 2024 sampai 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik sehingga Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya mulai dari tahun 2024 sampai 2026 menjadi lebih baik.

Lubuklinggau, 13 April 2022

Kepala DPPKB  
Kota Lubuklinggau



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
Nip.19830710 200112 2001

INDIKATOR UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA LUBUKLINGGAU

| No. | Tujuan                                     | Sasaran Strategis                                     | Indikator Tujuan/Sasaran                           | Keterangan  |
|-----|--|---|--|---|
| 1   | Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat | Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran | Rata - rata jumlah anak per keluarga               | Jumlah jiwa                                       |
|     |  |   |  | Jumlah KK x2 - jumlah janda duda                  |
|     |  |   | Angka Kelahiran Kasar (CBR)                        | Jumlah Kelahiran Hidup x 1000                     |
|     |  |   |  | Jumlah Penduduk pertengahan Tahun                 |
|     |  |   | Persentase Pernikahan Wanita usia dibawah 21 Tahun | Jumlah Wanita menikah umur dibawah 21 Tahun x 100 |
|     |  |   |  | Jumlah Seluruh Wanita Menikah                     |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
KEPALA DPPKB  
KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19830710 200112 20001

INDIKATOR NON UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA LUBUKLINGGAU

| No. | Tujuan   | Sasaran Antara |   |                              | Indikator Tujuan/Sasaran                | Keterangan   |   |  |   |
|-----|--|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|---|
| 1   | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran | 1.1.1.1        | Meningkatnya Kepersertaan KB Masyarakat |                              | Persentase peserta KB baru              | Jumlah peserta kb baru x 100   |   |  |   |
|     |  |                |   |                              |   | Perkiraan permintaan masyarakat  |   |  |   |
|     |  |                |   |                              |   | Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)  | Jumlah pus yang ingin ber-kb tetapi tidak terlayani X100 %                              |  |   |
|     |  |                |   |                              |   |  | Jumlah pasangan usia subur  |  |   |
|     |  |                |   |                              |   | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)  | Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP X100 %   |  |   |
|     |  |                |   |                              |   |  | Jumlah akseptor KB  |  |   |
|     |  |                |   |                              |   | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang alkon kb/kota x 100 |  |   |
|     |  |                |   |                              |   |  | Perkiraan permintaan masyarakat   |  |   |
|     |  |                |   |                              |   | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi   | Jumlah pasangan usia subur yang tdk lagi menggunakan kontrasepsi x 100                  |  |   |
|     |  |                |   |                              |   |  | Jumlah Akseptor kb  |  |   |
|     |  |                |   |                              |   | 1.1.1.1.1  | Meningkatnya akses pelayanan KB merata, berkualitas                                     | Persentase ketersediaan petugas pelayanan KB               | Jumlah petugas pelayan KB X 100                               |
|     |  |                |   |                              |   |  |   |  | Jumlah KKB/Poskeslur  |
|     |  |                |   |                              |   | Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga   | Jumlah Keluarga yang Terpapar Pesan/Informasi Program Bangga Kencana x 100              |  |   |
|     |  |                |   |                              |   |  | Jumlah Keluarga yang terdata  |  |   |
|     |  |                |   |                              |   | 1.1.1.1.2  | Meningkatnya Mekanisme Pembiayaan Pelayanan KB  | Persentase klinik KB terintegrasi dengan sistem pembiayaan | Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS X 100 |
|     |  |                |   |                              |   |  |   | Jumlah Faskes dan jejaring                                 |   |
|     |  |                | 1.1.1.1.3                               | Meningkatnya kualitas sarana | Persentase kecukupan Sarana & Prasarana | ketersediaan sarana prasarana/alkon x 100  |   |  |   |





|  |  |  |  |  |  |                                  |   |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|
|  |  |  |  |  |  | Persentase Jumlah PPKS Kecamatan | Jumlah PPKS Kecamatan x 100                 |
|  |  |  |  |  |  |                                  | Jumlah Kecamatan                            |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah PPKS yang Aktif           | Jumlah PPKS Yang Aktif x 100                |
|  |  |  |  |  |  |                                  | Jumlah Kecamatan                            |
|  |  |  |  |  |  | Cakupan PUS di poktan KB ber KB  | Jumlah anggota Kelompok peduli ber kb x 100 |
|  |  |  |  |  |  |                                  | Jumah PUS yang ada pada kelompok peduli KB  |

Lubuklinggau, 13 April 2023

KEPALA DPPKB  
KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19830710 200112 20001

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah

| NO | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran   | Satuan           | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- |       |       |       |      | Rasio Capaian pada Tahun Ke- |      |      |      |      |
|----|--|------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|-------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |  |                  |             |            |                          | 2023                            | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2019                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | 2  | 3                | 4           | 5          | 6                        | 11                              | 12   | 13    | 14    | 15    | 16   | 17                           | 18   | 19   | 20   | 21   |
| 1  | Rata - rata jumlah anak per keluarga   | Anak Perkeluarga |             |            |                          | 2.16                            | 1.99   | 1.784 | 1.83  | 1.78  |      | 0.89                         | 0.81 | 0.84 | 0.82 |      |
| 2  | Angka Kelahiran Kasar (CBR)  | 1000 Penduduk    |             |            |                          | 17.2                            | 19.24  | 18.02 | 18.08 | 18.27 |      | 1.00                         | 1.00 | 1.03 | 1.04 |      |
| 3  | Persentase Cakupan PUS yang isterinya dibawah 21 tahun   | %                |             |            |                          | 18.8                            | 19.69  | 19.4  | 21.9  | 25.2  |      | 0.98                         | 0.97 | 1.14 | 1.33 |      |
| 4  | Persentase peserta KB aktif (CPR)  | %                |             | 80         |                          | 80.10                           | 77.76  | 78.56 | 84.74 | 69.4  |      | 0.96                         | 1.04 | 1.07 | 0.87 |      |
| 5  | Persentase peserta KB baru (PB)  | %                |             |            |                          | 67                              | 44   | 53    | 58.43 | 57.40 |      | 0.55                         | 0.80 | 0.88 | 0.86 |      |
| 6  | Cakupan PUS yang tidak ingin ber-kb tidak terpenuhi (unmet need)                                   | %                |             | 10.18      |                          | 9.88                            | 11.32  | 11.26 | 7.92  | 18.5  |      | 0.90                         | 1.03 | 0.75 | 1.82 |      |
| 7  | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)  | %                |             |            |                          | 32                              | 31.433                                       | 30.22 | 30.32 | 19.05 |      | 1.46                         | 1.02 | 1.01 | 0.60 |      |
| 8  | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | %                |             |            |                          | 100                             | 100  | 108   | 88    | 53.07 |      | 1.00                         | 1.08 | 0.88 | 0.53 |      |
| 9  | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi   | %                |             |            |                          | 26.5                            | 28.5   | 27.29 | 9.68  | 9.14  |      | 1.16                         | 1.09 | 0.38 | 0.35 |      |
| 10 | Persentase ketersediaan petugas pelayanan KB   | %                |             |            |                          | 100                             | 96   | 94    | 96    | 114   |      | 1.03                         | 1.00 | 1.00 | 1.16 |      |
| 11 | Persentase Klinik KB dengan sistem pembiayaan  | %                |             |            |                          | 90                              | 83   | 84    | 81.8  | 100   |      | 1.00                         | 1.00 | 0.96 | 1.14 |      |
| 12 | Persentase Kecukupan Sarana & Prasarana Pendukung Pelayanan KB                                     | %                |             |            |                          | 100                             | 100  | 100   | 100   | 100   |      | 1.00                         | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
| 13 | Jumlah MOU / Kerjasama penyediaan pusat informasi KKB  | MOU              |             |            |                          | 6                               | 2  | 4     | 5     | 6     |      | 1.00                         | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
| 14 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga              | %                |             |            |                          | 80                              | 76.94  | 62.48 | 62.42 | 62.4  |      | 1.04                         | 0.82 | 0.80 | 0.78 |      |

|    |  |       |  |  |  |     |        |       |       |       |  |      |      |      |      |  |
|----|--|-------|--|--|--|-----|--------|-------|-------|-------|--|------|------|------|------|--|
| 15 | Persentase data KKBPk yang akurat dan tepat waktu                  | %     |  |  |  | 95  | 85     | 90    | 100   | 100   |  | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.05 |  |
| 16 | Rasio PLKB / PKB   | Rasio |  |  |  | 2.6 | 2.6    | 2.6   | 2.6   | 2.25  |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 |  |
| 17 | Persentase Tingkat akurasi data profil kependudukan                | %     |  |  |  | 95  | 85     | 90    | 100   | 100   |  | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.05 |  |
| 18 | Jumlah Kampung Kb yang Aktif                                       | %     |  |  |  | 12  | 8      | 10    | 10    | 11    |  | 1.00 | 1.11 | 1.00 | 1.00 |  |
| 19 | Cakupan PUS di poktan KB ber KB                                    | %     |  |  |  | 23  | 16     | 18    | 20    | 22    |  | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.00 |  |
| 20 | % Keluarga yang aktif dalam BKR (Tribina)                          | %     |  |  |  | 80  | 75.3   | 79.29 | 57.43 | 82.8  |  | 1.41 | 1.47 | 0.72 | 1.04 |  |
| 21 | Cakupan Stakholder aktif dalam Promosi BKR                         | %     |  |  |  | 31  | 10     | 15    | 25    | 28    |  | 1.00 | 0.68 | 1.00 | 1.00 |  |
| 22 | Cakupan Kebersertaan BKR diwilayahnya                              | %     |  |  |  | 65  | 45     | 48.96 | 45.69 | 57.4  |  | 1.00 | 0.98 | 0.83 | 0.96 |  |
| 23 | Persentase Peserta Kelompok BKB                                    | %     |  |  |  | 66  | 59.46  | 51.95 | 51.93 | 51.9  |  | 0.94 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |  |
| 24 | Persentase Peserta Kelompok BKB yang ber-KB                        | %     |  |  |  | 90  | 85.076 | 77.7  | 77.72 | 99.8  |  | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 1.12 |  |
| 25 | Persentase Cakupan Kelompok BKL                                    | %     |  |  |  | 66  | 77.76  | 52.98 | 51.22 | 51.2  |  | 1.25 | 0.84 | 0.80 | 0.79 |  |
| 26 | Persentase Cakupan Kelompok BKL yang Ber-KB                        | %     |  |  |  | 75  | 70     | 72    | 81.74 | 72.01 |  | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.96 |  |
| 27 | Keluarga pra ks/ks I yang ikut kelompok UPPKS                      | %     |  |  |  | 70  | 83.113 | 61.71 | 61.77 | 61.79 |  | 1.17 | 0.86 | 0.91 | 0.90 |  |
| 28 | Persentase Lembaga Pemerintah/Swasta yang memiliki PIK tahap Tegak | %     |  |  |  | 65  | 38.46  | 38.46 | 33.33 | 91    |  | 1.17 | 0.94 | 0.68 | 1.60 |  |
| 29 | Persentase PIK yang memiliki pengelola terlatih                    | %     |  |  |  | 70  | 44.11  | 46.15 | 40    | 48.06 |  | 0.98 | 1.00 | 0.74 | 0.78 |  |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
KEPALA DPPKB  
KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19830710 200112 20001

Tabel 2.1.a  
Data dan Informasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Uraian  | Satuan   | 2018  | 2019  | 2020  |
|---|----------|-------|-------|-------|
| <b>I. Pengendalian Penduduk</b>   |          |       |       |       |
| 1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga **                                | %        | 16.05 | 14.38 | 10.82 |
| 2. Jumlah Kelahiran ** (Org)  | Orang    | 227   | 424   | 193   |
| 3. Jumlah Kematian Penduduk ** (Org)                                    | orang    | 184   | 310   | 202   |
| 4. Jumlah Remaja Wanita Usia 15-19 Thn Yang Melahirkan **               | orang    | 63    | 67    | 53    |
| 5. Jumlah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Dari Wanita Usia 15-49 Thn ** | orang    | 49    | 45    | 35    |
| <b>II. Keluarga Berencana*</b>  |          |       |       |       |
| 1. Jumlah Pasangan Usia Subur**   | orang    | 46395 | 47758 | 46062 |
| 2. Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB**                      | orang    | 10703 | 10565 | 9507  |
| <b>III Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode**</b>                         |          |       |       |       |
| 1. Suntik KB/Implant**  | orang    | 14753 | 15175 | 14093 |
| 2. Obat/Pil KB**  | orang    | 7880  | 8223  | 8203  |
| 3. IUD/Spiral**   | orang    | 1014  | 1282  | 1318  |
| 4. Susuk**  | orang    | 8355  | 8008  | 8552  |
| 5. Kondom**   | Orang    | 2537  | 2643  | 2653  |
| 8. Vasektomi**  | Orang    | 174   | 174   | 174   |
| 9. Tubektomi**  | Orang    | 874   | 906   | 913   |
| <b>IV. Sarana dan Prasarana KB*</b>                                     |          |       |       |       |
| 1. Jumlah Alat Peraga KB**  | Orang    | 40    | 41    | 43    |
| 2. Jumlah Balai KB**  | Unit     | 8     | 8     | 8     |
| <b>V. Unit Pelayanan KB*</b>  |          |       |       |       |
| 1. Puskesmas**  | Unit     | 9     | 10    | 10    |
| 2. Puskesmas Pembantu**   | Unit     | 51    | 51    | 51    |
| 3. Klinik KB**  | Unit     | 61    | 65    | 68    |
| 4. Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa**                              | Unit     | 0     | 0     | 0     |
| <b>VI. Jumlah Tenaga Klinik KB</b>                                      |          |       |       |       |
| 1. Dokter**   | Orang    | 17    | 19    | 10    |
| 2. Bidan **   | Orang    | 92    | 92    | 95    |
| 3. Perawatan Kesehatan**  | Orang    | 27    | 34    | 34    |
| <b>VII. Jumlah Petugas KB**</b>   |          |       |       |       |
| <b>1. petugas Lapangan KB**</b>   |          |       |       |       |
| 1. Sudah Mengikuti Pelatihan**  | Orang    | 8     | 11    | 11    |
| 2. Belum Mengikuti Pelatihan**  | Orang    | 10    | 8     | 9     |
| <b>2. Penyuluh KB</b>   |          |       |       |       |
| 1. Sudah Mengikuti Pelatihan**  | Orang    | 27    | 27    | 27    |
| 2. Belum Mengikuti Pelatihan**  |          |       |       |       |
| <b>6. Jumlah Kelompok Bina Keluarga</b>                                 |          |       |       |       |
| 1. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita**                               | Kelompok | 79    | 79    | 79    |
| 2. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja**                               | Kelompok | 59    | 60    | 60    |
| 3. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia**                               | Kelompok | 64    | 65    | 67    |
| <b>7. Jumlah institusi Masyarakat Pedesaan**</b>                        |          |       |       |       |
| 1. Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa**                    | Orang    | 72    | 72    | 72    |
| 2. Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa                  | Orang    | 356   | 321   | 326   |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
KEPALA UP-PKB  
KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19830710 200112 20001

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kota Lubuklinggau**

| Uraian                                     | Anggaran Pada Tahun Ke- |                      |                      |                      |                      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                      |                      |                      |          | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |             |             |             |          | Rata-rata Pertumbuhan |                 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|  | 2019                    | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2019                              | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023     | 2019  | 2020        | 2021        | 2022        | 2023     | Jumlah                | Realisasi       |
| 1  | 2                       | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                                 | 8                    | 9                    | 10                   | 11       | 12  | 13          | 14          | 15          | 16       | 17                    | 18              |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                      | <b>6,449,334,916</b>    | <b>6,648,732,912</b> | <b>5,604,678,331</b> | <b>7,149,253,234</b> | <b>6,474,478,977</b> | <b>4,546,524,796</b>              | <b>5,980,218,048</b> | <b>5,220,328,165</b> | <b>5,945,837,094</b> | <b>-</b> | <b>0.70</b>                                   | <b>0.90</b> | <b>0.93</b> | <b>0.83</b> | <b>-</b> | <b>0.39</b>           | <b>30.78</b>    |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>6,419,334,916</b>    | <b>5,832,048,068</b> | <b>4,526,108,590</b> | <b>6,355,354,434</b> | <b>6,412,528,977</b> | <b>4,519,524,796</b>              | <b>5,222,553,048</b> | <b>4,515,623,165</b> | <b>5,241,797,094</b> | <b>-</b> | <b>0.70</b>                                   | <b>0.90</b> | <b>1.00</b> | <b>0.82</b> | <b>-</b> | <b>(0.11)</b>         | <b>15.98</b>    |
| Belanja Pegawai                            | 2,987,221,916           | 2,320,316,530        | 1,766,764,492        | 1,813,218,201        | 2,006,619,013        | 2,123,227,420                     | 2,225,551,800        | 1,758,516,727        | 1,776,663,998        | -        | 0.71  | 0.96        | 1.00        | 0.98        | -        | (32.83)               | (16.32)         |
| Belanja Barang dan Jasa                    | 3,432,113,000           | 3,511,731,538        | 2,759,344,098        | 4,542,136,233        | 4,305,909,964        | 2,396,297,376                     | 2,997,001,248        | 2,757,106,438        | 3,465,133,096        | -        | 0.70  | 0.85        | 1.00        | 0.76        | -        | 25.46                 | 44.60           |
| Belanja Hibah                              | -                       | -                    | -                    | -                    | 100,000,000          | -                                 | -                    | -                    | -                    | -        | -   | -           | -           | -           | -        | -                     | -               |
| <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>30,000,000</b>       | <b>816,684,844</b>   | <b>1,078,569,741</b> | <b>793,898,800</b>   | <b>61,950,000</b>    | <b>27,000,000</b>                 | <b>757,665,000</b>   | <b>704,705,000</b>   | <b>704,040,000</b>   | <b>-</b> | <b>0.90</b>                                   | <b>0.93</b> | <b>0.65</b> | <b>0.89</b> | <b>-</b> | <b>106.50</b>         | <b>2,507.56</b> |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 30,000,000              | 816,684,844          | 597,578,741          | 693,899,000          | 61,950,000           | 27,000,000                        | 757,665,000          | 226,320,000          | 604,170,000          | -        | 0.90  | 0.93        | 0.38        | 0.87        | -        | 106.50                | 2,137.67        |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | -                       | -                    | 416,491,000          | 99,999,800           | -                    | -                                 | -                    | 414,082,000          | 99,870,000           | -        | -   | -           | 0.99        | 1.00        | -        | -                     | -               |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | -                       | -                    | 25,000,000           | -                    | -                    | -                                 | -                    | 25,000,000           | -                    | -        | -   | -           | 1.00        | -           | -        | -                     | -               |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | -                       | -                    | 39,500,000           | -                    | -                    | -                                 | -                    | 39,303,000           | -                    | -        | -   | -           | 1.00        | -           | -        | -                     | -               |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
KEPALA DPPKB  
KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19830710 200112 20001

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kota Lubuklinggau**

| Uraian  | Anggaran Pada Tahun Ke- |               |               |               |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |               |               |               |      | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |      |      |      |      |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---|------|------|------|------|
|   | 2019                    | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2019                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1   | 2                       | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                 | 8             | 9             | 10            | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 462,903,400             | 569,952,206   |               |               |               | 440,314,367                       | 563,959,443   |               |               |      | 0.95  | 0.99 |      |      |      |
| Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur   | 169,540,000             | 542,761,432   |               |               |               | 140,257,944                       | 534,766,655   |               |               |      | 0.83  | 0.99 |      |      |      |
| Program Peningkatan disiplin Aparatur   | -                       | 16,200,000    |               |               |               | -                                 | 16,200,000    |               |               |      |   | 1.00 |      |      |      |
| Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur  | 28,500,000              | 6,500,000     |               |               |               | 26,625,500                        | 5,550,000     |               |               |      | 0.93  | 0.85 |      |      |      |
| Program Keluarga Berencana  | 460,420,000             | 74,875,000    |               |               |               | 398,456,500                       | 73,571,000    |               |               |      | 0.87  | 0.98 |      |      |      |
| Program Kesehatan Reproduksi remaja   | 62,800,000              | 64,820,000    |               |               |               | 42,710,410                        | 64,510,000    |               |               |      | 0.68  | 1.00 |      |      |      |
| Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri                 | 378,976,600             | 217,060,400   |               |               |               | 319,123,547                       | 192,492,151   |               |               |      | 0.84  | 0.89 |      |      |      |
| Program Pengembangan pusat pelayanan Informasi dan Konseling KRR                            | 48,860,000              | -             |               |               |               | 48,715,000                        | -             |               |               |      | 1.00  |      |      |      |      |
| Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Komunikasi/Informasi/Edukasi/Advokasi KB | 75,500,000              | 821,500,000   |               |               |               | 73,750,000                        | 541,138,000   |               |               |      | 0.98  | 0.66 |      |      |      |
| Program Peningkatan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan                | 1,861,493,000           | 2,159,736,000 |               |               |               | 1,023,479,118                     | 1,902,595,655 |               |               |      | 0.55  | 0.88 |      |      |      |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                 | -                       | -             | 2,242,163,840 | 2,876,743,996 | 2,701,214,263 |                                   |               | 2,219,227,913 | 2,798,627,798 |      |   |      | 0.99 | 0.97 |      |
| Program Pengendalian Penduduk   | -                       | -             | 652,769,641   | 192,006,068   | 156,038,480   |                                   |               | 297,894,300   | 178,282,447   |      |   |      | 0.46 | 0.93 |      |

|  |   |   |               |               |               |  |  |               |               |  |  |  |      |      |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|------|------|
| Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | - | - | 2,667,313,950 | 2,538,380,870 | 2,044,230,950 |  |  | 2,667,296,952 | 2,136,205,609 |  |  |  | 1.00 | 0.84 |
| Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera (KS) | - | - | 42,430,900    | 1,542,122,300 | 1,547,995,284 |  |  | 35,909,000    | 832,721,240   |  |  |  | 0.85 | 0.54 |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
KEPALA DPPKB  
KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19830710 200112 20001

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan dan Isu Strategis**

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra                        | Permasalahan   | Faktor  |   |
|----|--|--|---|---|
|    |  |  | Penghambat  | Pendorong   |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   |
| 1  | Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dari kelahiran | 1 Masih tingginya angka kelahiran  | 1 MCPR Masih Rendah   | 1 Pelayanan KB Bebas Retribusi  |
|    |  |  | 2 unmeet need di Kota Lubuklinggau masih tinggi,                        | 2 Pelayanan KB Jemput bola  |
|    |  | 2 Masih Rendahnya KB Pria  | 1 Belum adanya tenaga dokter untuk pelayanan vasektomi                  | 1 Akan dibangunnya Rumah Sakit Ibu dan Anak yang baru dengan fasilitas yang telah memadai |
|    |  |  | 2 Pengetahuan dan Kepercayaan masyarakat tentang KB Pria masih rendah   | 2 Bertambahnya tenaga Penyuluh KB   |
|    |  | 3 Angka Kelahiran umur 15-19 tahun relatif masih tinggi.                     | 1 Pernikahan Usia Muda masih Tinggi                                     | 1 Adanya Dukungan Stekholder dalam program kesehatan reproduksi (Kespro)                  |
|    |  |  | 2 Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro) Masih Rendah        | 2 Adanya Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi disekolah                                |
|    |  | 4 Belum Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Poktan Bangsa Kencana                | 1 Adanya Efek Terjadinya Pandemi Covid 19                               | 1 Adanya Alokasi Dana BOKB untuk Kegiatan Poktan Bangsa Kencana dan Dukungan Stakholder.  |
|    |  |  | 2 Sarana dan Prasarana Masih Kurang.                                    | 2 Penambahan Sarana dan Prasarana Bagi PKB/PLKB   |
|    |  | 5 Belum Optimalnya Kinerja PKB/PLKB ASN dan Non ASN                          | 1 Luas Wilayah Binaan dan Beban Kerja yang terlalu berat                | 1 Memberikan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Kinerja                                 |
|    |  | 6 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) | 1 Masih Kurangnya Pelaksanan Program Pembangunan Keluarga di Kampung KB | 1 Adanya Komitmen Lintas Sektor untuk Penyelenggaraan Kampung KB                          |
|    |  |  | 2 Masih Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan Pengelola Kampung KB      | 2 Adanya Dana BOKB untuk Program Bangsa Kencana Di Kampung KB                             |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
KEPALA DPPKB  
KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.SIP, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19830710 200112 20001

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

| Tujuan Kota | Sasaran   | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran |  | Satuan           | Target | Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke |       |       |
|-------------|---|----------------------------------|--|------------------|--------|--------------------------------------|-------|-------|
|             |   |                                  |  |                  | 2023   | 2024                                 | 2025  | 2026  |
| 1           | 2   | 3                                |  | 4                | 5      | 6                                    | 7     | 8     |
| 1.1.        | Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat              | Indeks Kesehatan                 |  | indeks           | 0,76   | 0,86                                 | 0,88  | 0,90  |
|             | Terkendallinya laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran | 1                                | Rata - rata jumlah anak per keluarga               | Anak Perkeluarga | 2.16   | 2.12                                 | 2.10  | 2.08  |
|             |   | 2                                | Angka Kelahiran Kasar (CBR)                        | Per1000 Penduduk | 17.02  | 18.62                                | 18.39 | 18.16 |
|             |   | 3                                | Persentase Pernikahan Wanita usia dibawah 21 Tahun | %                | 18,8   | 20,5                                 | 20    | 19,5  |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
 KEPALA DPPKB  
 KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19830710 200112 20001

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

| Tujuan |  | Sasaran |   | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|--------|--|---------|---|--|--|
| 1.1    | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran | 1.1.1   | Meningkatnya akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas   | 1. Peningkatan kepersertaan ber KB   | 1. Meningkatkan jaminan kepersertaan ber KB<br>2. Meningkatkan pembinaan kepersertaan ber KB   |
|        |  |         |   | 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayan ber KB                                       | 1. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi<br>2. Meningkatkan sarana fasilitas pelayanan ber KB  |
|        |  | 1.1.2   | Meningkatnya advokasi dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) | 1. Peningkatan KIE program KKBPK   | 1. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat peduli KB<br>2. Meningkatkan pembinaan institusi masyarakat perkotaan peduli KB (IMP)                             |
|        |  |         |   | 2. Peningkatan kualitas informasi data kependudukan, KB dan pembangunan keluarga (KKBPK) | 1. Meningkatkan ketersediaan data mikro keluarga<br>2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan data program KKBPK   |
|        |  | 1.1.3   | Meningkatnya fungsi keluarga untuk ketahanan keluarga   | 1. Peningkatan bina ketahanan keluarga   | 1. Meningkatkan kepersertaan bina keluarga balita, remaja dan lansia<br>2. Pemberdayaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)                                |
|        |  |         |   | 2. Peningkatan Advokasi kesehatan reproduksi remaja (KRR)                                | 1. Meningkatkan advokasi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah dan masyarakat<br>2. Meningkatkan pembinaan kelompok peduli kesehatan reproduksi remaja |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
KEPALA DPPKB  
KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19830710 200112 20001

**MATRIKS RENSTRA**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Keluarga Berencana**  
**Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026**

| Tujuan | Sasaran                                    |         | kode  | Program dan Kegiatan |   |  |  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                    | Realisasi   |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra |             |             |             |               |  | unit/bidang Penanggung-jawab | Lokasi      |       |     |
|--------|--|---------|---|----------------------|---|--|--|---|---|------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|--|------------------------------|-------------|-------|-----|
|        |  |         |   |                      |   |  |  |   | 2023  | Tahun-2024 |  | Tahun-2025  |             | Tahun-2026  |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra |                              |             |       |     |
|        |  |         |   |                      |   |  |  |   |   | target     | Rp   | target      | Rp          | target      | Rp            | target                                     |                              |             | Rp    |     |
| 1      | 2  |         | 3   | 5                    |   |  |  | 6   | 7   | 14         | 15   | 16          | 17          | 18          | 19            | 20   | 21                           | 22          | 23    |     |
| I      | Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat |         |   |                      |   |  |  | Indeks Kesehatan  | 0,76  | 0,86       |  | 0,88        |             | 0,90        |               | 0,90                                       |                              |             |       |     |
|        |  | I.I     | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan kelahiran |                      |   |  |  | Rata- rata jumlah anak dalam keluarga   | 1.79  | 2.12       |  | 2.10        |             | 2.08        |               | 2.08                                       |                              | DPPKB       | Llg   |     |
|        |  |         |   |                      |   |  |  | Angka Kelahiran Kasar (CBR)   | 18,27   | 18,62      |  | 18,39       |             | 18,16       |               | 18,16                                      |                              | DPPKB       | Llg   |     |
|        |  |         |   |                      |   |  |  | Persentase Pernikahan Wanita usia dibawah 21 Tahun  | 21,9%   | 20,50      |  | 20%         |             | 19,50       |               | 19%  |                              | DPPKB       | Llg   |     |
|        |  | 1.1.1.2 | Meningkatnya Peran Serta Stakholder Dalam KKB         |                      |   |  |  | Jumlah MoU/Kerjasama Penyediaan Pusat Informasi KKB   | 6 MOU   | 8 MOU      |  | 10 MOU      |             | 12 MOU      |               | 12 MOU                                     |                              |             |       |     |
|        |  |         |   | 2.14.02              | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   |  |  |   | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga    | 100%       | 93%  | 175,241,150 | 94%         | 179,622,179 | 95%           | 184,112,733                                | 95%                          | 184,112,733 | DPPKB | LLG |
|        |  |         |   |                      |   |  |  | % Data KKBPk yang akurat dan tepat waktu  | 95%   | 90%        | 36,000,000                                 | 95%         | 36,900,000  | 95%         | 37,822,500    | 95%  | 37,822,500                   | DPPKB       | LLG   |     |
|        |  | 1.1.2.2 | Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan             |                      |   |  |  | % Tingkat Akurasi Data Profil Kependudukan  | 95%   | 100%       |  | 100%        |             | 100%        |               | 100%                                       |                              |             |       |     |
|        |  |         |   | 2.14.02.201          | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |  |  |   | Persentase Tingkat Akurasi Data Profil Kependudukan | 100%       | 100%                                       | 36,000,000  | 100%        | 36,900,000  | 100%          | 37,822,500                                 | 100%                         | 37,822,500  |       |     |
|        |  |         |   | 2.14.02.201.02       |   |  | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 20,000,000                                 | 1 Dokumen   | 20,500,000  | 1 Dokumen   | 21,012,500.00 | 1 Dokumen                                  | 21,012,500.00                | DPPKB       | LLG   |     |
|        |  |         |   | 2.14.02.201.05       |   |  | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal               | Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal               | 3 Dokumen   | 3 Dokumen  | 16,000,000                                 | 3 Dokumen   | 16,400,000  | 3 Dokumen   | 16,810,000.00 | 3 Dokumen                                  | 16,810,000.00                | DPPKB       | LLG   |     |
|        |  |         |   | 2.14.02.202          |   |  | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota                        | Jenis informasi data mikro kependudukan keluarga  | 3 Jenis   | 3 Jenis    | 175,241,150                                | 3 Jenis     | 179,622,179 | 3 Jenis     | 184,112,733   | 3 Jenis                                    | 184,112,733                  | DPPKB       | LLG   |     |
|        |  |         |   | 2.14.02.202.09       |   |  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                             | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                             | 12 Laporan  | 12 Laporan | 20,000,000                                 | 12 Laporan  | 20,500,000  | 12 Laporan  | 21,012,500.00 | 1 Laporan                                  | 21,012,500.00                | DPPKB       | Llg   |     |
|        |  |         |   | 2.14.02.202.11       |   |  | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga   | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya   | 3 Dokumen   | 3 Dokumen  | 47,741,150                                 | 3 Dokumen   | 48,934,679  | 3 Dokumen   | 50,158,045.72 | 3 Dokumen                                  | 50,158,045.72                | DPPKB       | LLG   |     |

|  |  |         |   |  |  |  |  |            |              |                    |              |                    |              |                    |              |                    |       |     |
|--|--|---------|---|--|--|--|--|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|-----|
|  |  |         | 2.14.02.202.12  |  |  | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga   | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga  | 12 Laporan | 12 Laporan   | 29,100,000         | 12 Laporan   | 29,827,500         | 12 Laporan   | 30,573,187.50      | 1 Laporan    | 30,573,187.50      | DPPKB | LLG |
|  |  |         | 2.14.02.202.13  |  |  | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                  | 1 Laporan  | 1 Dokumen    | 98,400,000         | 1 Dokumen    | 100,860,000        | 1 Dokumen    | 103,381,500        | 1 Dokumen    | 103,381,500        | DPPKB | LLG |
|  |  | 1.1.3   | Meningkatnya Peran Serta Keluarga dalam bina Keluarga             |  |  |  | Persentase Keluarga yang Aktif dalam BKR (Tribina)   | 82,29%     | 82.00%       |                    | 83.00%       |                    | 85.0%        |                    | 85%          |                    |       |     |
|  |  | 1.1.4   | Meningkatnya Kualitas Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja |  |  |  | Cakupan Kampung KB yang Memiliki PIK-Remaja  | 0%         | 70%          |                    | 75%          |                    | 80%          |                    | 80%          |                    |       |     |
|  |  | 1.1.2   | Meningkatnya Peran Serta Stakholder Dalam KKB                     |  |  |  | Jumlah MoU/Kerjasama Penyediaan Pusat Informasi KKB  | 6 MOU      | 8 MOU        |                    | 10 MOU       |                    | 12 MOU       |                    | 12 MOU       |                    |       |     |
|  |  | 1.1.1   | Meningkatnya Kesertaan KB Baru                                    |  |  |  | Persentase Peserta KB Baru   | 57,4%      | 15%          |                    | 17%          |                    | 19%          |                    | 19%          |                    |       |     |
|  |  |         |   |  |  |  | Persentase peserta KB aktif (CPR)  | 69,42%     | 57,91%       |                    | 63,40%       |                    | 63,90%       |                    | 63,90%       |                    |       |     |
|  |  |         | 2.14.03   |  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   | Persentase Peserta KB Baru   | 57,4%      | 55.00%       | <b>648,575,000</b> | 60.00%       | <b>664,789,375</b> | 65%          | <b>681,409,109</b> | 19%          | <b>681,409,109</b> | DPPKB | Lig |
|  |  |         |   |  |  |  | Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)  | 18,52%     | 16,23%       | 40,400,000         | 10,50%       | 41,410,000         | 10,10%       | 42,445,250         | 10,10%       | 42,445,250         | DPPKB | Lig |
|  |  |         |   |  |  |  | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)  | 19,05%     | 28,39%       | 425,000,000        | 32,3%        | 435,625,000        | 33%          | 446,515,625        | 33%          | 446,515,625        | DPPKB | Lig |
|  |  |         |   |  |  |  | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi   | 9,14 %     | 25.50%       | 149,841,700        | 24,5%        | 153,587,743        | 23.5%        | 157,427,436        | 23.5%        | 157,427,436        | DPPKB | Lig |
|  |  |         |   |  |  |  | Persentase peserta KB aktif (CPR)  | 69,42%     | 57,91%       | 554,600,000        | 63,40%       | 568,465,000        | 63,90%       | 582,676,625        | 63,90%       | 582,676,625        | DPPKB | Lig |
|  |  |         |   |  |  |  | Persentase Kampung KB Yang Mandiri   | 20.00%     | 20%          | 673,000,000        | 30.0%        | 689,825,000        | 40.00%       | 707,070,625        | 40.00%       | 707,070,625        | DPPKB | Lig |
|  |  | 1.1.3.1 | Meningkatnya Peran Kader/Penyuluh dalam BKR                       |  |  |  | Cakupan kepersertaan BKR di Kota Lubuklinggau  | 57,4%      | 70%          | 2,491,416,700      | 73%          |                    | 75%          |                    | 75%          |                    |       |     |
|  |  | 1.1.2.3 | Meningkatnya Kelompok peduli KB                                   |  |  |  | Persentase Kampung KB yang Mandiri Berkualitas   | 14         | 20           |                    | 30           |                    | 40           |                    | 40           |                    |       |     |
|  |  | 1.1.3.3 | Meningkatnya Usaha Pendapatan Masyarakat                          |  |  |  | Cakupan Kampung KB yang memiliki UPPKA   | 61,07%     | 85%          |                    | 90%          |                    | 95%          |                    | 95%          |                    |       |     |
|  |  | 1.1.2.1 | Meningkatnya Ketersediaan SDM Penyuluh                            |  |  |  | Rasio PKB/PLKB   | 2,25       | 1,6 Rasio    |                    | 1,5 Rasio    |                    | 1,4 Rasio    |                    | 1,4 Rasio    |                    |       |     |
|  |  |         | 2.14.03.201   |  |  | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> | Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangsa Kencana   | 79,27%     | 80%          | 648,575,000        | 85%          | 664,789,375        | 90%          | 681,409,109.38     | 75%          | 681,409,109.38     |       |     |
|  |  |         | 2.14.03.201.01  |  |  | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja   | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,            | 31 orang   | 5 Organisasi | 4,375,000          | 5 Organisasi | 4,484,375          | 5 Organisasi | 4,596,484.38       | 5 Organisasi | 4,596,484.38       | DPPKB | LLG |
|  |  |         | 2.14.03.201.02  |  |  | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal   | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, | 8 Kec.     | 5 Dokumen    | 25,000,000         | 5 Dokumen    | 25,625,000         | 5 Dokumen    | 26,265,625         | 5 Dokumen    | 26,265,625         | DPPKB | LLG |

|  |  |         |   |  |  |  |   |  |              |              |             |              |             |              |               |              |               |       |     |
|--|--|---------|---|--|--|--|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|-----|
|  |  |         |   |  |  |  | Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga  | 2 Media      | 6 Dokumen    | 70,200,000  | 6 Dokumen    | 71,955,000  | 6 Dokumen    | 73,753,875    | 6 Dokumen    | 73,753,875    | DPPKB | LLG |
|  |  |         |   |  |  |  | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakornas),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan                | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui                                 | 72 Kelurahan | 8 Laporan    | 145,000,000 | 8 Laporan    | 148,625,000 | 8 Laporan    | 152,340,625   | 8 Laporan    | 152,340,625   | DPPKB | LLG |
|  |  |         |   |  |  |  | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPk  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana   | 8 Kec.       | 8 Laporan    | 324,000,000 | 8 Laporan    | 332,100,000 | 8 Laporan    | 340,402,500   | 8 Laporan    | 340,402,500   | DPPKB | LLG |
|  |  |         |   |  |  |  | Pengendalian Program KKBPk  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk  | 8 Kec.       | 2 Laporan    | 80,000,000  | 2 Laporan    | 82,000,000  | 2 Laporan    | 84,050,000    | 2 Laporan    | 84,050,000    | DPPKB | LLG |
|  |  | 1.1.2.1 | Meningkatnya Ketersediaan SDM Penyuluh                        |  |  |  |   | Rasio PKB/PLKB   | 2,25         | 1,6 Rasio    |             | 1,5 Rasio    |             | 1,4 Rasio    |               | 1,4 Rasio    |               |       |     |
|  |  |         |   |  |  |  | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>  | Rasio PKB/PLKB   | 2,25         | 1,6          | 554,600,000 | 1,5          | 568,465,000 | 1,4          | 582,676,625   | 1,4          | 582,676,625   | DPPKB | LLG |
|  |  |         |   |  |  |  | Pembinaan IMP dan Program KKBPk di lini lapangan oleh PKB/PLKB  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga  | 5 Sektor     | 5 Organisasi | 25,000,000  | 6 Organisasi | 25,625,000  | 7 Organisasi | 26,265,625    | 7 Organisasi | 26,265,625    | DPPKB | LLG |
|  |  |         |   |  |  |  | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB  | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia   | 100%         | 5 Unit       | 184,000,000 | 5 Unit       | 188,600,000 | 5 Unit       | 193,315,000   | 5 Unit       | 193,315,000   | DPPKB | Llg |
|  |  |         |   |  |  |  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | 72 PPKBD     | 383 Orang    | 345,600,000 | 393 Orang    | 354,240,000 | 403 Orang    | 363,096,000   | Orang        | 363,096,000   | DPPKB | LLG |
|  |  | 1.1.1.3 | Meningkatnya Kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan KB |  |  |  |   | % Kecukupan Sarana PrasaranaPendukung Pelayanan  | 100%         | 100%         |             | 100%         |             | 100%         |               | 100%         |               |       |     |
|  |  | 1.1.1.2 | Meningkatnya Mekanisme pembiayaan pelayanan KB                |  |  |  |   | % Klinik keluarga berencana terintegrasi dengan sistem pembiayaan  | 90%          | 90%          |             | 90,5%        |             | 100%         |               | 100%         |               |       |     |
|  |  | 1.1.1.1 | Meningkatnya Kompetensi SDM Pelayanan KB                      |  |  |  |   | % Ketersediaan petugas pelayanan KB  | 100%         | 100%         |             | 100%         |             | 100%         |               | 100%         |               |       |     |
|  |  | 1.1.3.1 | Meningkatnya Peran Kader/Penyuluh dalam BKR                   |  |  |  |   | Cakupan kepersertaan BKR di Kota Lubuklinggau  | 57,4%        | 70%          |             | 73%          |             | 75%          |               | 75%          |               |       |     |
|  |  | 1.1.4.1 | Meningkatnya Kompetensi Pengelola PIK                         |  |  |  |   | Persentase Jumlah Pendidik Sebaya Terlatih   |              | 73%          |             | 75%          |             | 80%          |               | 80%          |               |       |     |
|  |  |         |   |  |  |  | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>               | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat   | 100%         | 100%         | 615,241,700 | 100%         | 630,622,743 | 100%         | 646,388,311   | 100%         | 646,388,311   |       | LLG |
|  |  |         |   |  |  |  | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 24 Faskes    | 24 Laporan   | 34,841,700  | 24 Laporan   | 35,712,743  | 24 Laporan   | 36,605,561.06 | Laporan      | 36,605,561.06 | DPPKB | LLG |

|  |  |         |   |                |  |  |   |  |                   |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |       |     |
|--|--|---------|---|----------------|--|--|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|-----|
|  |  |         |   | 2.14.03.203.03 |  |  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | 6103 Akseptor     | 21000 Orang       | 425,000,000   | 21500 Orang       | 435,625,000   | 22000 Orang       | 446,515,625   | 22000 Orang       | 446,515,625   | DPPKB | LLG |
|  |  |         |   | 2.14.03.203.06 |  |  | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB  | 1 Unit            | 1 Unit            | 100,000,000   | 1 Unit            | 102,500,000   | 1 Unit            | 105,062,500   | Unit              | 105,062,500   | DPPKB | LLG |
|  |  |         |   | 2.14.03.203.07 |  |  | Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB  | 721 Akseptor      | 800 Orang         | 15,000,000    | 850 Orang         | 15,375,000    | 900 Orang         | 15,759,375    | 900 Akseptor      | 15,759,375    | DPPKB | LLG |
|  |  |         |   | 2.14.03.203.08 |  |  | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                  | 732 Dropout       | 24 Laporan        | 24,000,000    | 24 Laporan        | 24,600,000    | 24 Laporan        | 25,215,000    | 24 Laporan        | 25,215,000    | DPPKB | LLG |
|  |  |         |   | 2.14.03.203.09 |  |  | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas  | 21 Akseptor MO    | 360 Orang         | 16,400,000    | 370 Orang         | 16,810,000    | 380 Orang         | 17,230,250    | 380 Orang         | 17,230,250    | DPPKB | LLG |
|  |  | 1.1.2.3 | Meningkatnya Kelompok peduli KB                                   |                |  |  |   | Persentase Kampung KB Yang Mandiri   | 14                | 20                |               | 30                |               | 40                |               | 40                |               |       |     |
|  |  |         |   | 2.14.03.204    |  |  | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang Terbentuk di Kampung KB  | 38,8              | 52,7              | 673,000,000   | 66,6              | 689,825,000   | 70                | 707,070,625   | 70                | 707,070,625   |       |     |
|  |  |         |   | 2.14.03.204.02 |  |  | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB   | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB   | 6 Dokumen         | 6 Dokumen         | 190,000,000   | 10 Dokumen        | 194,750,000   | 13 Dokumen        | 199,618,750   | 13 Dokumen        | 199,618,750   | DPPKB | LLG |
|  |  |         |   | 2.14.03.204.03 |  |  | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB   | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | 28 Kampung KB     | 72 Kampung KB     | 483,000,000   | 72 Kampung KB     | 495,075,000   | 72 Kampung KB     | 507,451,875   | 72 Kampung KB     | 507,451,875   | DPPKB | LLG |
|  |  | 1.1.3   | Meningkatnya Peran Serta Keluarga dalam bina Keluarga             |                |  |  |   | Persentase Keluarga yang Aktif dalam BKR (Tribina)   | 82,8%             | 82,00%            |               | 83,00%            |               | 80,50%            |               | 80,50%            |               |       |     |
|  |  | 1.1.4   | Meningkatnya Kualitas Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja |                |  |  |   | Cakupan Kampung KB yang Memiliki PIK-Remaja  |                   | 70%               |               | 75%               |               | 80%               |               | 80%               |               |       |     |
|  |  |         |   | 2.14.04        |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)  | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)  | 53,31 Skala 0-100 | 60,91 Skala 0-100 | 1,725,464,350 | 61,00 Skala 0-100 | 1,256,100,959 | 62,90 Skala 0-100 | 1,287,503,483 | 62,90 Skala 0-100 | 1,287,503,483 | DPPKB | LLG |
|  |  | 1.1.3.1 | Meningkatnya Peran Kader/Penyuluh dalam BKR                       |                |  |  |   | Cakupan kepersertaan BKR di Kota Lubuklinggau  | 57,4%             | 70%               |               | 73%               |               | 75%               |               | 75%               |               |       |     |
|  |  | 1.1.3.2 | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bina Keluarga Berencana |                |  |  |   | Cakupan Kepersertaan BKB Kota Lubuklinggau   | 51,9%             | 69%               |               | 70%               |               | 71%               |               | 71%               |               |       |     |
|  |  |         |   |                |  |  |   | Cakupan Kepersertaan BKL Kota Lubuklinggau   | 51,2%             | 66%               |               | 67%               |               | 68%               |               | 68%               |               |       |     |
|  |  |         |   |                |  |  |   | Persentase Peserta Kelompok BKB yang ber-KB  | 90%               | 91%               |               | 92%               |               | 93%               |               | 93%               |               |       |     |

|  |  |         |  |                 |  |   |  |                |              |               |              |               |              |               |              |               |       |     |
|--|--|---------|--|-----------------|--|---|--|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|-----|
|  |  |         |  |                 |  |   | Persentase Peserta Kelompok BKL yang Ber-KB  | 72%            | 78%          |               | 79%          |               | 80%          |               | 80%          |               |       |     |
|  |  | 1.1.3.3 | Meningkatnya Usaha Pendapatan Masyarakat |                 |  |   | Cakupan Kampung KB yang Memiliki UPPKA   | 61,07%         | 85%          |               | 90%          |               | 95%          |               | 95%          |               |       |     |
|  |  | 1.1.4.1 | Meningkatnya Kompetensi Pannelola PIK    |                 |  |   | Persentase Jumlah Pendidik Sebaya Terlatih   |                | 73%          |               | 75%          |               | 80%          |               | 80%          |               |       |     |
|  |  |         |  | 2.14.04.201     |  | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>  | Cakupan Kampung KB yang Memiliki UPPKA   | 61,07%         | 68%          | 100,000,000   | 69%          | 102,500,000   | 70%          | 105,062,500   | 70%          | 105,062,500   | DPPKB | LLG |
|  |  |         |  |                 |  |   | Persentase Keluarga yang Aktif dalam BKR (Tribina)   | 82,8%          | 82%          | 1,625,464,350 | 83%          | 1,153,600,959 | 85%          | 1,182,440,983 | 85%          | 1,182,440,983 | DPPKB | LLG |
|  |  |         |  | 2.14.04.2.01.01 |  | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk | 8 Kecamatan    | 333 Kelompok | 42,430,900    | 349 Kelompok | 43,491,672.50 | 366 Kelompok | 44,578,964.31 | 366 Kelompok | 44,578,964.31 | DPPKB | LLG |
|  |  |         |  | 2.14.04.2.01.02 |  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | 32 KIT         | 25 Unit      | 360,000,000   | 25 Unit      | 369,000,000   | 14 Unit      | 378,225,000   | 14 Unit      | 378,225,000   | DPPKB | LLG |
|  |  |         |  | 2.14.04.2.01.04 |  | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | 2 Kali         | 32 Orang     | 36,000,000    | 32 Orang     | 36,900,000    | 32 Orang     | 37,822,500    | 32 Orang     | 37,822,500    | DPPKB | LLG |
|  |  |         |  | 2.14.04.2.01.05 |  | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | 480 Pendamping | 480 Orang    | 565,200,000   | 480 Orang    | 579,330,000   | 480 Orang    | 593,813,250   | 480 Orang    | 593,813,250   | DPPKB | LLG |
|  |  |         |  | 2.14.04.2.01.06 |  | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | 80 Kelompok    | 80 Kelompok  | 100,000,000   | 90 Kelompok  | 102,500,000   | 100 Kelompok | 105,062,500   | 366 Kelompok | 105,062,500   | DPPKB | LLG |
|  |  |         |  | 2.14.04.201.07  |  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | 3 Kegiatan     | 2 Laporan    | 39,300,000    | 2 Laporan    | 40,282,500    | 2 Laporan    | 41,289,562.50 | 2 Laporan    | 41,289,562.50 | DPPKB | LLG |

|  |  |  |  |  |  |  |   |           |              |                  |              |               |              |                  |              |                  |       |     |
|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-------|-----|
|  |  |  |  |  |  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 4 kali    | 2 Laporan    | 82,533,450       | 2 Laporan    | 84,596,786    | 2 Laporan    | 86,711,705.91    | 2 Laporan    | 86,711,705.91    | DPPKB | LLG |
|  |  |  |  |  |  | <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan</b>           |   | %         |              | 500,000,000      | %            | 512,500,000   | %            | 525,312,500      | %            | 525,312,500      | DPPKB | LLG |
|  |  |  |  |  |  | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran)                                       | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran)  | 8 Laporan | 8 Laporan    | 250,000,000      | 8 Laporan    | 256,250,000   | 8 Laporan    | 262,656,250.00   | 8 Laporan    | 262,656,250.00   | DPPKB | LLG |
|  |  |  |  |  |  | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)   | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)  | 18350     | 8992 Laporan | 250,000,000      | 6000 Laporan | 256,250,000   | 5000 Laporan | 262,656,250.00   | 5000 Laporan | 262,656,250.00   | DPPKB | LLG |
|  |  |  |  |  |  |  | Tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah   | 100%      | 100%         |                  | 100%         |               | 100%         |                  | 100%         |                  |       |     |
|  |  |  |  |  |  | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Penunjang Bidang KB   | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah   | BB        | BB           |                  | BB           |               | BB           |                  | BB           |                  |       |     |
|  |  |  |  |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah</b>   | 100%      | 100%         | 2,946,161,707.00 | 100%         | 3,019,815,750 | 100%         | 3,095,311,143.42 | 100%         | 3,095,311,143.42 |       |     |
|  |  |  |  |  |  | <b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase dokumen, evaluasi dan laporan keuangan dengan</b>   | 100%      | 100%         | 25,000,000       | 100%         | 25,625,000    | 100%         | 26,265,625       | 100%         | 26,265,625       |       |     |
|  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 laporan | 3 Dokumen    | 15,000,000       | 3 Dokumen    | 15,375,000    | 3 Dokumen    | 15,759,375       | 3 Dokumen    | 15,759,375       | DPPKB | LLG |
|  |  |  |  |  |  | Evaluasi kinerja perangkat daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 3 laporan | 3 laporan    | 10,000,000       | 3 laporan    | 10,250,000    | 3 laporan    | 10,506,250       | 3 laporan    | 10,506,250       | DPPKB | LLG |
|  |  |  |  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan</b>   | 100%      | 100%         | 1,944,590,959.00 | 100%         | 1,993,205,733 | 100%         | 2,043,035,876.30 | 100%         | 2,043,035,876.30 |       |     |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 90%       | 25 Orang     | 1,944,590,959.00 | 25 Orang     | 1,993,205,733 | 25 Orang     | 2,043,035,876.30 | 25 Orang     | 2,043,035,876.30 | DPPKB | LLG |
|  |  |  |  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Daerah</b>   | <b>Tingkat kedisiplinan aparatur</b>  | 100%      | 100%         | 31,500,000.00    | 100%         | 32,287,500    | 100%         | 33,094,687.50    | 100%         | 33,094,687.50    |       |     |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | 54 Org    | 25 Paket     | 16,500,000.00    | 25 Paket     | 16,912,500    | 25 Paket     | 17,335,312.50    | 25 Paket     | 17,335,312.50    | DPPKB | LLG |
|  |  |  |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsinya   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan   | 3 Org     | 3 Org        | 15,000,000       | 3 Org        | 15,375,000    | 3 Org        | 15,759,375.00    | 3 Org        | 15,759,375       | DPPKB | LLG |
|  |  |  |  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | 100%      | 100%         | 294,705,600      | 100%         | 302,073,240   | 100%         | 309,625,071      | 100%         | 309,625,071      |       |     |

|                    |  |  |  |                 |  |  |  |                  |             |             |             |               |             |                |             |                |       |               |  |  |
|--------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------|---------------|--|--|
|                    |  |  |  | 2.14.1.2.06.03  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 10 Jenis         | 10 Paket    | 6,000,000   | 10 Paket    | 6,150,000     | 10 Paket    | 6,303,750.00   | 10 Paket    | 6,303,750      | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.1.2.06.04  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 50 Orang,3Jenis  | 22 Paket    | 61,235,600  | 23 Paket    | 62,766,490    | 24 Paket    | 64,335,652.25  | 25 Paket    | 64,335,652.25  | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.1.2.06.05  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 10 Item          | 9 Paket     | 13,470,000  | 10 Paket    | 13,806,750    | 11 Paket    | 14,151,918.75  | 11 Paket    | 14,151,918.75  | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.1.2.06.02  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                        | 10 Paket         | 10 Paket    | 5,000,000   | 10 Paket    | 5,125,000     | 10 Paket    | 5,253,125.00   | 10 Paket    | 5,253,125      | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.1.2.06.06  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                     | 20 Bacaan        | 20 Dokumen  | 9,000,000   | 20 Dokumen  | 9,225,000     | 20 Dokumen  | 9,455,625      | 20 Dokumen  | 9,455,625      | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.1.2.06.09  |  | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 100%             | 40 Laporan  | 200,000,000 | 40 Laporan  | 205,000,000   | 40 Laporan  | 210,125,000    | 40 Laporan  | 210,125,000    | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.07    |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 100%             | 100%        | 290,000,000 | 100%        | 297,250,000   | 100%        | 304,681,250    | 100%        | 304,681,250    |       |               |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.07.2  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                            | 1 Unit           | 1 Unit      | 250,000,000 | 1 Unit      | 256,250,000   | 1 Unit      | 262,656,250    | 1 Unit      | 262,656,250    | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.07.5  |  | Pengadaan Mebeleur   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 9 Unit           | 9 Unit      | 20,000,000  | 10 Unit     | 20,500,000    | 11 Unit     | 21,012,500     | 11 Unit     | 21,012,500     | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.07.10 |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan             | 6 Unit           | 7 Unit      | 20,000,000  | 8 Unit      | 20,500,000    | 9 Unit      | 21,012,500     | 10 Unit     | 21,012,500     | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.08    |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 100%             | 100%        | 162,827,148 | 100%        | 166,897,827   | 100%        | 171,070,272.37 | 100%        | 171,070,272.37 |       |               |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.08.01 |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 285 lembar       | 285 Laporan | 2,850,000   | 285 Laporan | 2,921,250     | 285 Laporan | 2,994,281.25   | 285 Laporan | 2,994,281.25   | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.08.02 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan           | 100%             | 12 Laporan  | 24,617,148  | 12 Laporan  | 25,232,577    | 12 Laporan  | 25,863,391.12  | 12 Laporan  | 25,863,391.12  | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.08.03 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                             | 15 Orang         | 12 Laporan  | 135,360,000 | 12 Laporan  | 138,744,000   | 12 Laporan  | 142,212,600    | 6 Laporan   | 142,212,600    | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.09    |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                       | Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100%             | 100%        | 197,538,000 | 100%        | 202,476,450   | 100%        | 207,538,361.25 | 100%        | 207,538,361.25 |       |               |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.09.01 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan              | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                           | 7 Mobil 55 Motor | 62 Unit     | 10,300,000  | 62 Unit     | 10,557,500    | 62 Unit     | 10,821,437.50  | 62 Unit     | 10,821,437.50  | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.09.02 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya         | 57 Unit          | 62 Unit     | 114,018,000 | 62 Unit     | 116,868,450   | 62 unit     | 119,790,161.25 | 62 Unit     | 119,790,161.25 | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.09.06 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 35 Unit          | 30 Unit     | 23,220,000  | 30 Unit     | 23,800,500    | 30 Unit     | 24,395,512.50  | 30 Unit     | 24,395,512.50  | DPPKB | LLG           |  |  |
|                    |  |  |  | 2.14.01.2.09.09 |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                         | 100%             | 2 Unit      | 50,000,000  | 2 Unit      | 51,250,000    | 2 Unit      | 52,531,250.00  | 2 Unit      | 52,531,250.00  | DPPKB | LLG           |  |  |
| <b>Jumlah Pagu</b> |  |  |  |                 |  |  |  |                  |             |             |             | 7,374,283,907 |             | 7,046,141,005  |             | 7,222,294,530  |       | 7,222,294,530 |  |  |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
KEPALA DPPKB  
KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19830710 200112 20001

















Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| NO | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran                   | Target Ditahun | Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke |       |       |
|----|--|----------------|--------------------------------------|-------|-------|
|    |  | 2023           | 2024                                 | 2025  | 2026  |
| 1  | 2  | 3              | 4                                    | 5     | 6     |
| 1  | Rata - rata Jumlah anak per keluarga               | 2.16           | 2,12                                 | 2,10  | 2,08  |
| 2  | Angka Kelahiran Kasar (CBR)                        | 17.2           | 18,62                                | 18,39 | 18,16 |
| 3  | Persentase Perkawinan Wanita usia dibawah 21 Tahun | 18.8           | 20,50                                | 20    | 19,50 |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
 KEPALA DPPKB  
 KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19830710 200112 20001

Tabel 7.1.a

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| NO | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran   | Target Ditahun | Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke |       |       |
|----|--|----------------|--------------------------------------|-------|-------|
|    |  | 2023           | 2024                                 | 2025  | 2026  |
| 1  | 2  | 3              | 4                                    | 5     | 6     |
| 1  | TFR (Angka Kelahiran Total)  | 2,32           | 2,14                                 | 2,10  | 2,08  |
| 2  | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/m CPR) | 57,91          | 62,31                                | 64,49 | 63,90 |
| 3  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)                         | 11,27          | 11,2                                 | 10,50 | 9,80  |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
 KEPALA DPPKB  
 KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19830710 200112 20001

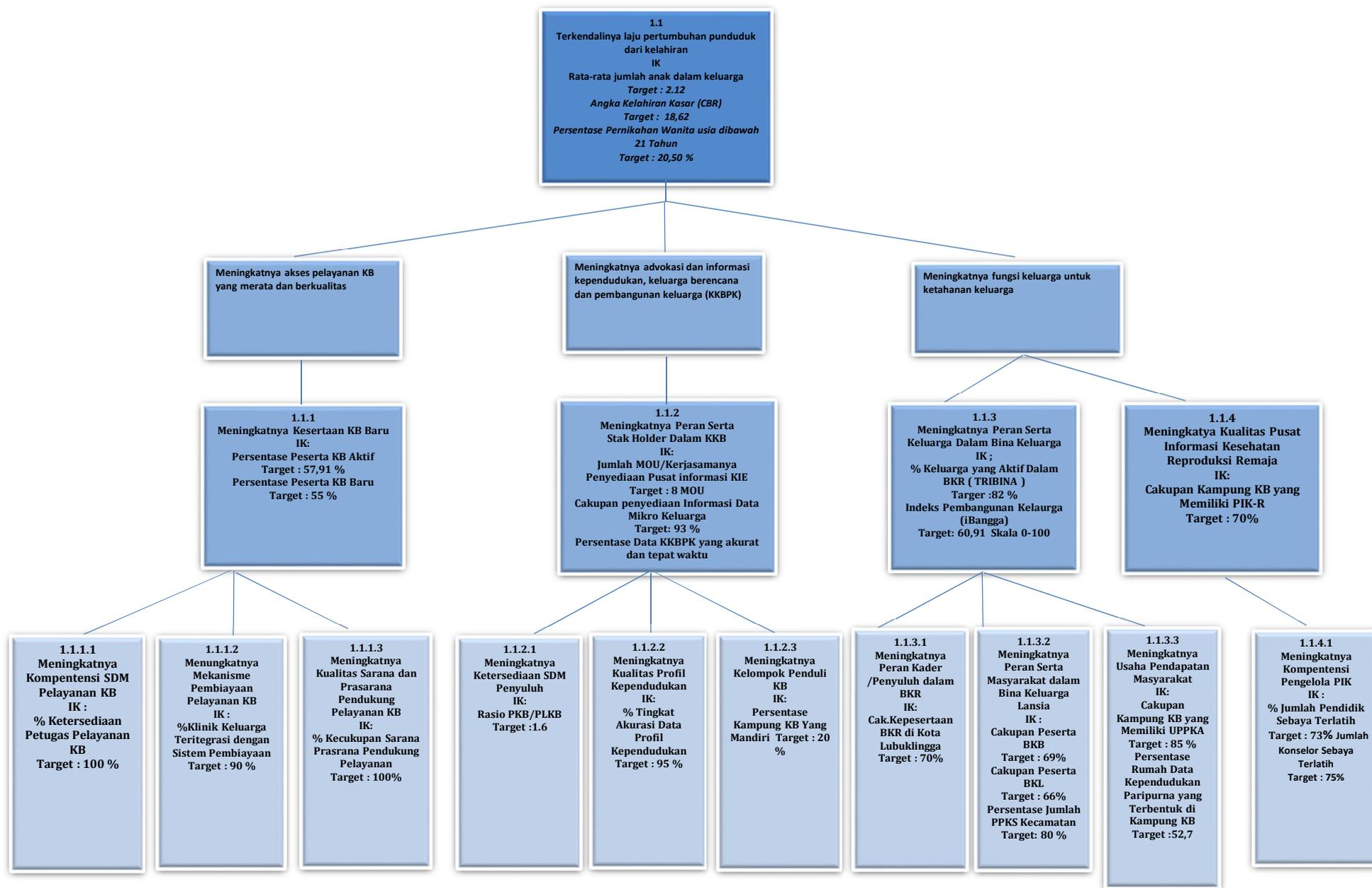
Tabel 7.2.b  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah

| NO | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran   | Target Ditahun    | Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke |                   |                   |
|----|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |  | 2023              | 2024                                 | 2025              | 2026              |
| 1  | 2  | 3                 | 4                                    | 5                 | 6                 |
| 1  | Persentase peserta KB aktif (CPR)  | 80,10             | 57,91                                | 63,40             | 63,90             |
| 2  | Persentase peserta KB baru (PB)  | 67                | 55                                   | 60                | 65,00             |
| 3  | Cakupan PUS yang tidak ingin ber-kb tidak terpenuhi (unmet need)                                   | 9,88              | 16,23                                | 10,50             | 10,10             |
| 4  | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)  | 32                | 28,39                                | 32,3              | 33                |
| 5  | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)  | 53,31 Skala 0-100 | 60,91 Skala 0-100                    | 61,00 Skala 0-100 | 62,90 Skala 0-100 |
| 6  | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 100               | 100                                  | 100               | 100               |
| 6  | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi   | 26,5              | 25,5                                 | 24,5              | 23,5              |
| 7  | Persentase ketersediaan petugas pelayanan KB   | 100               | 100                                  | 100               | 100               |
| 8  | Persentase Klinik KB dengan sistem pembiayaan  | 90                | 90                                   | 90,50             | 100               |
| 9  | Persentase Kecukupan Sarana & Prasarana Pendukung Pelayanan KB                                     | 100               | 100                                  | 100               | 100               |
| 10 | Jumlah MOU / Kerjasama penyediaan pusat informasi KKB  | 6 MOU             | 8 MOU                                | 10 MOU            | 12 MOU            |
| 11 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga   | 100               | 93                                   | 94                | 95                |
| 12 | Persentase data KKBPK yang akurat dan tepat waktu  | 95                | 95                                   | 96                | 97                |
| 13 | Rasio PLKB / PKB   | 2,6               | 1,6                                  | 1,5               | 1,4               |
| 14 | Persentase Tingkat akurasi data profil kependudukan  | 95                | 95                                   | 95                | 95                |
| 15 | Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana                                       | 79,27             | 80                                   | 85                | 90                |
| 16 | Persentase Kampung KB Yang Mandiri   |                   | 20                                   | 30                | 40                |
| 17 | Persentase Keluarga yang aktif dalam BKR (Tribina)   | 80                | 82                                   | 83                | 85,00             |
| 18 | Cakupan Kepesertaan BKR diwilayahnya   | 65                | 70                                   | 73                | 75                |
| 19 | Cakupan Kepesertaan BKB Kota Lubuklinggau  | 66                | 69                                   | 70                | 71                |
| 20 | Persentase Peserta Kelompok BKB yang ber-KB  | 90                | 91                                   | 92                | 93                |
| 21 | Persentase Keluarga yang Aktif dalam Bina Keluarga Balita  |                   | 80                                   | 81                | 82                |
| 22 | Cakupan Kepesertaan BKL Kota Lubuklinggau  | 66                | 66                                   | 67                | 68                |
| 23 | Persentase Peserta Kelompok BKL yang Ber-KB  | 75                | 78                                   | 79                | 80                |
| 24 | Cakupan Kampung KB yang Memiliki UPPKA   |                   | 85                                   | 90                | 95                |
| 25 | Persentase Peserta Kelompok UPPKA yang Ber-KB  |                   | 75                                   | 78                | 80                |
| 26 | Cakupan Kampung Kb yang Memiliki PIK-Remaja  | 65                | 70                                   | 75                | 80                |
| 27 | Persentase Jumlah Pendidik Sebaya Terlatih   | 70                | 73                                   | 75                | 80                |
| 28 | Persentase Jumlah Konselor Sebaya Terlatih   |                   | 75                                   | 76                | 80                |
| 29 | Persentase Jumlah PPKS Kecamatan   |                   | 80                                   | 82                | 85                |
| 30 | Persentase Jumlah PPKS Yang Aktif  |                   | 80                                   | 84                | 85                |

Lubuklinggau, 13 April 2023  
KEPALA DPPKB  
KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty, S.S I P, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19830710 200112 20001



Lubuklinggau, 13 April 2023  
KEPALA DPPKB  
KOTA LUBUKLINGGAU,



Henny Fitrianty,S.STP,M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19830710 200112 20001